

RPSEP-26

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ari Mulianta Ginting^{*)}

Abstract

Economic development has main goals to increase the welfare of all Indonesian people. But in reality, until now there is still happened regional disparities in Indonesia. Thus, this research goals are to know the development of regional disparities in Indonesia and to analyze the influence of regional GDP per capita, investment, and agglomeration to regional disparities in Indonesia. Using qualitative and quantitative analyze method and using data from 2004 until 2012 this research have some conclusion, the first conclusion from qualitative analyze is that the regional disparities that shown by Williamson's index from the year 2004 until 2004 for eastern Indonesia higher than western Indonesia. This result shown that regional disparities in eastern Indonesia is higher than western Indonesia. The second conclusion, from the quantitative analyze has shown that variables such as regional GDP per capita, and investment have negative and significant influence to regional disparities, meanwhile agglomeration has positive and significant influence to regional disparities.

Keywords : regional GDP per capita, agglomeration, investment, regional disparities.

Abstrak

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang terjadi bahwa sampai pada saat ini, masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif dan kuantitatif analisis dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2012 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yang pertama bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2012 indeks williamson untuk Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan timur masih terjadi. Kedua, berdasarkan

^{*)}Penulis adalah peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR
RI : arigins2@gmail.com

analisa kuantitatif didapatkan hasil bahwa variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Kata Kunci : PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, Ketimpangan antar Wilayah

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 194 dalam aline ke-4 secara tersurat menegaskan tujuan didirikannya Pemerintah Negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari tujuan ini adalah pemerintah harus menciptakan dan mendorong kesejahteraan bagi rakyat namun harus disertai dengan adanya azas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang dinamakan pembangunan.

Proses pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlangsung secara kontinu namun tidak diimbangi dengan azas keadilan dan pemerataan. Dampaknya yang langsung terlihat adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Untuk itu maka diperlukan suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah menurut Sjafrizal (2012) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*).³⁴

³⁴Sjafrizal.(2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press. Jakarta.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahapan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antarwilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekutan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

Ketimpangan wilayah timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Armida S. Alisjahbana mengatakan bahwa salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak tahun 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antar daerah yang lebih lebar.³⁶

Ketimpangan pembangunan antara provinsi di Indonesia yang terjadi menurut Deputi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin, mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan daerah sampai saat ini masih banyak ketimpangan. Secara khusus ketimpangan tersebut hampir disemua sektor terutama pada ketersediaan sarana publik, pendidikan dan kesehatan. Bukan hanya ketimpangan saja, bahkan pembangunan selama ini mengabaikan kawasan timur Indonesia.³⁷ Bahkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam kunjungannya ke redaksi *Bisnis Indonesia* mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan di Indonesia

³⁵ Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. 7th Edition. Wesley Longman, Inc. New York.

³⁶ Armida S. Alisjahbana. (2005). *Kesenjangan Regional di Indonesia* Lembaga Penelitian SMERU.

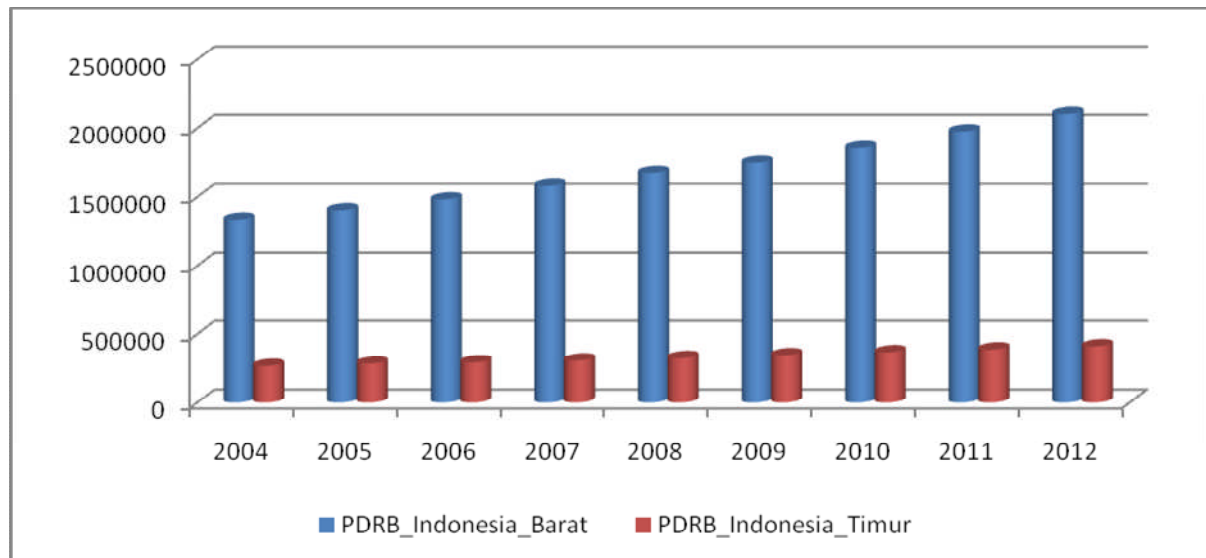
³⁷ "Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Terjadi". Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://nasional.kontan.co.id/news/ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-masih-tinggi>.

bagian timur, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di lapangan di Indonesia bagian timur.³⁸ Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan kepada azas pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dimana pun mereka berada..

Ketimpangan antar wilayah di Indonesia yang terjadi padahal pada saat yang bersamaan provinsi-provinsi tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing provinsi, baik provinsi yang berada di Indonesia bagian Barat maupun yang berada di Indonesia bagian Timur. Gambar 1. menunjukkan kepada kita perkembangan PDRB dari Indonesia Bagian Barat yang meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan PDRB dari Indonesia Bagian Timur yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Dari Gambar 1 tersebut juga PDRB Indonesia bagian Barat menyumbang rata-rata hampir 83,4% dari total PDB nasional, sementara PDRB dari provinsi yang ada di Indonesia bagian timur menyumbang hanya rata-rata 16,57% dari PDB nasional. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya ketimpangan yang cukup parah di Indonesia, antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Padahal peningkatan pertumbuhan PDRB di Indonesia diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁸“Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>.

**Gambar 1. Perkembangan PDRB Indonesia Bagian Barat dan Timur
(dalam Milyar Rp)**



Sumber : BPS (2014).

Perkembangan ketimpangan antar wilayah yang terjadi hingga pada saat sekarang menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Makadalam penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan yang kedua adalah menganalisis pengaruh PDRB per kapita, Investasi, dan Aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sadono Sukirno (2012) pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini dengan berikut : *economic development is growth plus change*-yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan sajaterarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegitan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian

yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah penataan pembagian pendapatan.³⁹

Lebih lanjut mengenai pembangunan ekonomi, menurut Wilardjo (2003) dalam Basuki Pujoalwanto (2014) mengatakan bahwa secara metaforis pembangunan ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju *desiderata*, yaitu tahap demi tahapnya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang meningkat. Sedana dengan Wilardjo, Abdullah (2010) mengatakan bahwa pembangunan semestinya berpihak kepada manusia. Keduanya terlihat menekankan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai martabat dalam kehidupannya.⁴⁰

Dalam hipotesa Neo Klasik dalam Sjafrizal (2012) proses pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya dan dapat mengarah kepada ketimpangan ekonomi antar wilayah. Menurut hipotesa Neo Klasik tersebut pada permulaan proses pembanguan suatu negara, ketimpangan pembangunan natar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasrakan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cendrung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan akan menjadi rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik.⁴¹

Kebenaran Hipotesis Neo Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson dalam Sjafrizal (2012) melalui studi yang dilakukan pada tahun 1966 tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

³⁹Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.423.

⁴⁰Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Graha Ilmu. Jakarta. Hlm.15.

⁴¹Sjafrizal, *Op.cit.* hlm 108.

Thee Kian Wie (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandang ekonomi dibagi menjadi menjadi : (1) Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution outcome*); (2) Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*); (3) Ketimpangan pembagian pendapatan antara daerah (*regional income disparities*).⁴²

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (1955).

Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan sebagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah negara India, Srilangka, serta Puerto Rico dan hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahapan perkembangan (diwakili dengan PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesa U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik⁴³

⁴²Thee Kian Wie.(1982). *Perekonomian di Negara Berkembang*. Pustaka Jaya. Jakarta

⁴³ Munawir Ismail. (1995). *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*. Prisma tahun XXIV No. 1

Gambar 1.
Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir yang coba disusun oleh penulis, terlihat ingin mencoba melihat pengaruh antara variabel PDRB, investasi, dan aglomerasi, terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi antara provinsi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai perkembangan ketimpangan pembangunan di Indonesia. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson⁴⁴ :

⁴⁴Sjafrizal. *Loc Cit.* hlm. 110-111

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i / n)}}{y}$$

Dimana :

V_w = Koefisien Variasi Williamson (Indeks Williamson)

Y_i = PDRB Per Kapita Daerah masing-masing Provinsi di Indonesia

Y = PDB per kapita nasional seluruh provinsi di Indonesia

f_i = Jumlah penduduk masing-masing provinsi di Indonesia i

n = Jumlah penduduk seluruh Indonesia

Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai dengan angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin lebar.

Metodologi yang digunakan dalam analisis adalah model ekonometri berupa panel data (gabungan antara *time series* dengan *cross section*), yang selanjutnya akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas mengenai data yang digunakan, konsep-konsep. Di samping itu dibahas pula mengenai teknik pendugaan dan pengujian parameter yang digunakan. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi Panel yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian. Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$IW_{it} = a_{it} + b_{it}PDRB_{it} + c_{it}I_{it} + d_{it}Ag_{it} + e_{it}$$

Dimana IW_{it} adalah ketimpangan wilayah, a adalah konstanta, b , c dan d adalah koefisien regresi, $PDRB_{it}$ jumlah PDRB per kapita masing-masing provinsi, Ag_{it} adalah aglomerasi masing-masing provinsi, I_{it} adalah jumlah investasi untuk masing-masing provinsi e_{it} merupakan *error term*, i adalah provinsi di Indonesia, t adalah periode waktu, tahun 2004 sampai 2013.

Metode Estimasi

Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi panel data. Estimasi panel data adalah estimasi yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross*

section. Salah satu tujuan menggunakan estimasi panel menurut Baltagi (1995) yaitu dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel independen, sehingga analisis lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang mendekati realita. Dalam estimasi panel data, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*. Untuk memilih antara pendekatan *common effects* dan *fixed effects* digunakan Uji F.

Rumus Uji F yang digunakan adalah $F = F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)}$, dimana R_{UR}^2 adalah

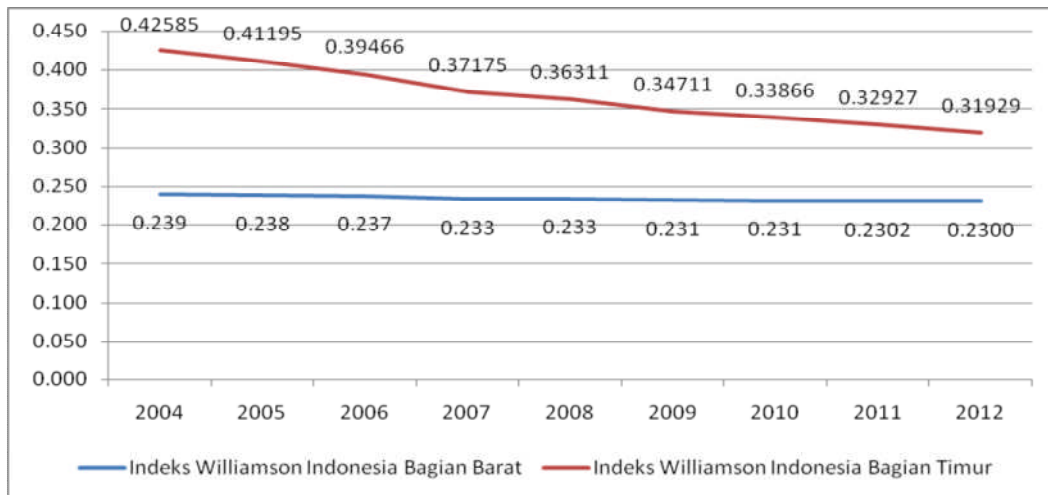
R^2 untuk *fixed effects*, R_R^2 adalah R^2 untuk *common effects*, m adalah jumlah restriksi, n adalah banyaknya observasi dan k adalah jumlah parameter dalam *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *common effects* dan H_a : *fixed effects*. Sedangkan untuk memilih antara pendekatan *fixed effects* dan *random effects* digunakan Uji Hausman. Dimana hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *random effects* dan H_a : *fixed effects*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Penelitian ini mengukur ketimpangan pembangunan dengan menggunakan Indeks Williamson yang dipakai untuk melihat indeks ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila indeks mendekati nol berarti sangat merata. Dari Gambar 2. terlihat perkembangan ketimpangan ekonomi berdasarkan data dari Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan membagi menjadi dua bagian, yaitu Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Indonesia bagian barat sendiri terdiri dari Provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Sedangkan Indonesia bagian timur terdiri dari provinsi-provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Pulau Papua.

Gambar 2. Perkembangan Indeks Williamson antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014).

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan kepada kita bahwa indeks williamson untuk Indonesia Bagian Timur lebih tinggi dibandingkan Indeks Williamson untuk Indonesia Bagian Barat. Perbedaan indeks yang lebih tinggi pada Indonesia bagian timur menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia bagian timur lebih timpang dari pada pembangunan di Indonesia Bagian Barat. Pada tahun 2004 indeks williamson untuk Indonesia bagian timur adalah sebesar 0,4285 sedangkan indeks williamson untuk Indonesia bagian barat lebih rendah dibandingkan indeks williamson untuk Indonesia bagian timur yaitu sebesar 0,239.

Akan tetapi yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2004, ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004, indeks williamson untuk Indonesia bagian timur cukup tinggi sebesar 0,42585 sedangkan indeks williamson untuk Indonesia Bagian Barat sebesar 0,239. Perbedaan indeks williamson yang cukup tinggi menandakan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar atau tinggi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Akan tetapi secara perlahan namun pasti, pada periode selanjutnya indeks williamson untuk Indonesia bagian timur mengalami penurunan dari 0,42585 pada tahun 2004 maka

pada tahun 2012 menjadi 0,31929. Hal ini pertanda terjadi peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia bagian timur sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi.

Terjadinya penurunan ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya di Indonesia bagian timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Menurut Stiglitz yang dikutip oleh Rama, *et. al.* mengatakan bahwa fungsi pemerintah itu sendiri diantaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.⁴⁵

Namun demikian gap antara indeks williamson untuk Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat secara keseluruhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tercipta di Indonesia bagian timur memang terjadi akan tetapi belum dapat mengimbangi pembangunan yang terjadi di Indonesia bagian barat. Untuk itu maka diperlukan suatu strategi “*crash program*” untuk mendorong terjadinya konvergensi antara pembangunan di Indonesia bagian bagian barat dan timur. Sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat segera dapat diatasi dengan cepat dan tuntas.

2. Analisis Hasil Estimasi

Pengolaha data dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 6* dengan metode *fixed effect* dengan pembobotan *cross section weight* untuk data *cross section* Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur dengan *time series* untuk tahun 2004 sampai dengan 2012.

⁴⁵Rama Nurhuda, Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4.

Penentuan metode estimasi *fixed effect* dengan *cross section weight*, dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian sebagai berikut :

- a. Untuk pemilihan metode estimasi untuk penggunaan metode *individual effect* atau *common effect* dilakukan dengan uji F.

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (intersep sama/ *common effect*)

$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$ (*individual effect*)

$$F = F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)} = \frac{(0,796 - 0,679)/4}{(1 - 0,796)/25 - 7} = 13,65$$

Berdasarkan rumus diatas didapatkan nilai F-hitung sebesar 13,62, sementara nilai F tabel sebesar 2,40. Maka F-hitung > F-tabel sehingga H_0 ditolak, yang menyatakan bahwa intersep adalah sama yaitu dengan metode *common effect*, dan metode yang lebih baik adalah metode estimasi dengan *individual effect*, dimana intersep antar individu berbeda.

- b. Dari efek individual, dilakukan pengujian untuk pemilihan antara model efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) yaitu melalui *redundant fixed effect tests*.

H_0 : *fixed effect*

H_1 : *random effect*

Hasil dari *Hausman test* diperoleh hasil sebagai berikut :

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.142528	(8,6)	0.9926
Period Chi-square	3.131718	8	0.9258

Sumber : eviews 6 diolah

Dengan nilai probabilita sebesar 0.9926, maka H_0 (model *fixed effect*) tidak ditolak, sehingga model yang tepat adalah menggunakan efek tetap (*fixed effect*). Berdasarkan hasil tersebut, maka model diestimasi menggunakan *fixed effect*. Maka model estimasi terbaik yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel1. Hasil Regresi Panel Belanja Total

Variabel Dependen: Log(IW?)			
Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Log(PDRB?)	-1.052843	-3.013554	0.0100
Log(I?)	-0.425902	-2.945005	0.0114
Log(Ag?)	3.120115	15.37875	0.0001
Fixed Effects (Cross)			
_Barat-C	-3.01495		
_DIY-C	3.001495		
R ²	0,982632		
F	232,1833		
Prob(F-Stat)	0.0001		

Sumber: data diolah dengan *Eviews 6.0*

Dari Tabel 1. Dapat dilihat bahwa uji F dari pengaruh pertumbuhan masing-masing variabel mulai dari pendapatan perkapita, investasi dan aglomerasi terhadap pertumbuhan ketimpangan pembangunan dalam hal ini ditunjukkan oleh indeks williamson menunjukkan angka signifikan dengan probabilitas (F-stat) = 0,00001 < α (0.05). Ini artinya, secara bersama-sama pertumbuhan dari masing-masing variabel independen dalam model secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan variabel dependen. Nilai R²*adjusted* sebesar 0,9862 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 98,62 persen. Dalam metode estimasi panel data sering mengandung masalah heteroskedastisitas, tetapi dalam estimasi ini tidak mengandung masalah tersebut. Karena model ini diestimasi menggunakan Metode GLS *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Error and Covariance*, sehingga diasumsikan model sudah bersifat homoskedastisitas.

3. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Hasil analisa regresi panel diperoleh bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil dari pada alpha 0,05. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa kenaikan 1% pertumbuhan PDRB per kapita akan meningkatkan menurunkan pertumbuhan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 1,052%. Hasil regresi ini berarti setiap terjadi kenaikan pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia maka akan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi.

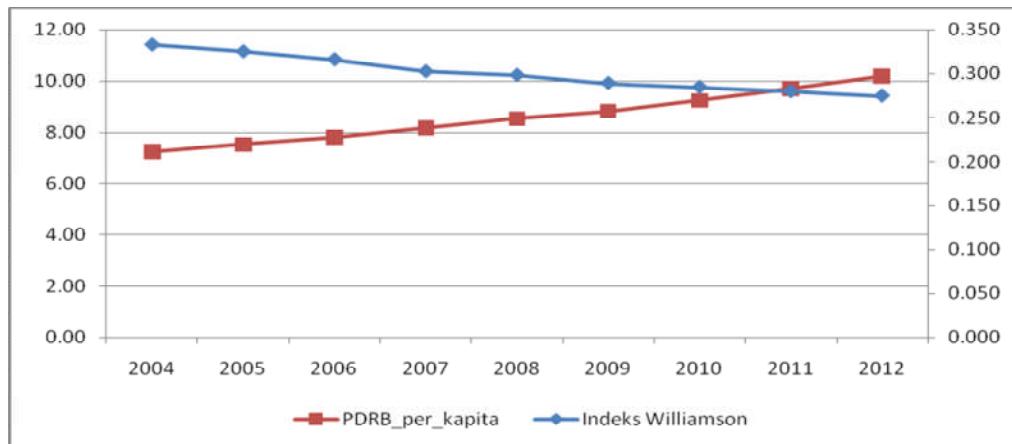
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sutarno dan Mudrajat Kuncoro yang mengatakan bahwa berdasarkan sampel Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mendukung berlakunya hipotesa Kuznet terjadi untuk Kabupaten Banyumas.⁴⁶ Pengaruh negatif dan signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pembangunan wilayah sesuai dengan hipotesa Neo-Klasik yang mengatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun.

Berdasarkan analisa grafik jelas menunjukkan hal tersebut, Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2004 indeks williamson yang menggambarkan ketimpangan antar wilayah sebesar 0,332 dan PDRB per kapita sebesar Rp. 7,25 juta. Pada perkembangan selanjutnya indeks williamson mengalami tren penurunan sedangkan PDRB per kapita pada tahun-tahun selanjutnya menunjukkan tren peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian ini membuktikan Hipotesa Neo-

⁴⁶Sutarno dan Mudrajat Kuncoro.(2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang.

Klasik benar. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hipotesa Kuznet mengenai kurva U terbalik berlaku di Indonesia.

Gambar 3. PDRB per Kapita dan Indeks Williamson Indonesia Tahun 2004 sampai dengan 2012



Sumber :Data diolah (2014).

4. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Hasil analisa regresi panel terhadap menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien variabel investasi yang negatif 0,4259 dan probabilitinya sebesar 0.0114 lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,05. Hasil ini berarti bahwa setiap 1 % peningkatan pertumbuhan investasi yang dilakukan maka dapat mengurangi 0,4259% pertumbuhan ketimpangan, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil tersebut, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dapat diselesaikan salah satunya dengan cara meningkatkan investasi yang merata di seluruh Indonesia, baik Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur.

Teori yang dikemukakan oleh Myrdal yang dikutip oleh Yenniwati mengatakan bahwa dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sedangkan wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah

menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidak merataan pembangunan⁴⁷. Dan kondisi tersebut terjadi di Indonesia, dimana investasi lebih banyak terpusat pada Indonesia bagian barat yang memiliki harapan laba yang tinggi.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Budiantoro Hartono pada tahun 2008 dengan menggunakan sampel Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan salah satunya bahwa peningkatan nilai investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Setiap peningkatan nilai investasi berarti meningkatkan kegiatan penanaman modal yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi maka akan mengakibatkan kepada peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun.⁴⁸ Yuniwati yang melakukan penelitian pada tahun 2013 terhadap provinsi di Sumatera juga menemukan hasil yang senada, yaitu variabel investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di provinsi yang ada di Sumatera.⁴⁹

5. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Berdasarkan hasil regresi diatas, diperoleh hasil bahwa variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi baik untuk Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada alpha 5%. Kenaikan 1 persen aglomerasi akan meningkatkan pertumbuhan ketimpangan wilayah sebesar 3,12%, *ceteris paribus*. Semakin meningkatnya aglomerasi maka akan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi hanya di pusat-pusat kegiatan aktivitas perekonomian. Sedangkan bagi daerah lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah.⁵⁰

⁴⁷Yeniwati.(2013). *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol II No. 03.

⁴⁸Budiantoro Hartono. (2008). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

⁴⁹.Yeniwati.*Ibid*.

⁵⁰Yuki Anglia. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuki pada tahun 2010⁵¹ yang menggunakan sampel DKI Jakarta dan Jaime Bonnet pada tahun 2006. Jaime Bonnet dengan menggunakan data dan sampel Kolombia. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara aglomerasi produksi dengan ketimpangan pembangunan regional suatu wilayah. Berdasarkan hasil tersebut, untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia maka yang diperlukan adalah penyebaran sentra-sentra produksi barang dan jasa keseluruh wilayah di Indonesia. Sentra-sentra produksi barang dan jasa yang selama ini hanya terdapat di Indonesia bagian barat, seperti Jawa dan Sumatera sudah waktunya dilakukan penyebaran ke seluruh wilayah di Indonesia.

6. Analisa Cross Section

Berdasarkan angka koefisien *cross section*, disebutkan apabila variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian barat memiliki indeks yang negatif dan cukup tinggi (-3,01495). Sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian timur mengalami indeks yang positif (3,001495). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat variabel independen konstan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian barat akan memiliki kecenderungan menurun sebaliknya di Indonesia bagian timur mengalami kecenderungan peningkatan.

D. PENUTUP

Dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu, pertama indeks wiliamson untuk Indonesia bagian timur dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan indeks williamson untuk Indonesia bagian barat. Hal ini pertanda bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia

⁵¹Yuki. *Ibid.*

selama tahun 2004 sampai dengan 2012 lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian barat. Akan tetapi yang cukup menarik adalah terjadi penurunan yang signifikan indeks williamson dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 untuk Indonesia bagian timur.

Kedua, berdasarkan hasil analisa regresi panel didapatkan kesimpulan bahwa variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya setiap pertumbuhan variabel PDRB per kapita dan investasi dapat mengurangi besarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil ini berarti bahwa setiap terjadi aglomerasi di suatu wilayah dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi panel tersebut, maka untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara antara lain mendorong terciptanya pertumbuhan PDRB per kapita di seluruh Indonesia, meningkatkan investasi yang masuk ke daerah-daerah seluruh Indonesia dan terakhir dapat mengurangi terjadinya aglomerasi di sentra-sentra produksi di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Armida S. Alisjahbana. (2005). *Kesenjangan Regional di Indonesia* Lembaga Penelitian SMERU.
- Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Budiantoro Hartono. (2008). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. 7th Edition. Wesley Longman, Inc. New York.
- “Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Terjadi”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://nasional.kontan.co.id/news/ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-masih-tinggi>.
- “Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>.
- Munawir Ismail. (1995). *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*. Prisma tahun XXIV No. 1.

- Rama Nurhuda, Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.423.
- Sutarno dan Mudrajat Kuncoro.(2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang.
- Thee Kian Wie.(1982). *Perekonomian di Negara Berkembang*. Pustaka Jaya. Jakarta
- Yeniwati.(2013). *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*.Jurnal Kajian Ekonomi. Vol II No. 03.
- Yuki Anglia. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.